



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			✓												

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									✓															

Babel Terima WDP Gubernur Berharap Ada Perbaikan

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Diterimanya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana melakukan koordinasi lebih lanjut guna membahas langkah-langkah perbaikan dan pembenahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke depan.

"Dari opini WDP yang kita terima, perlu segera ditindaklanjuti. Saya akan mengundang SKPD terkait untuk berkoordinasi kembali. Saya berharap SKPD dapat melakukan perbaikan lebih baik ke depan," ungkap Gubernur Babel, Rustam Effendi usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Provinsi Babel Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD Babel, Senin (18/7).

Dikatakannya, koordinasi perlu dilakukan terutama dalam menginventarisir sejumlah item yang menjadi catatan BPK atas pemberian opini WDP. Baik yang menyangkut permasalahan as-

set maupun dana hibah. Koordinasi diharapkan dapat mempermudah proses penyelesaian hasil temuan. Selain itu akan memberikan hasil positif dan manfaat besar guna mewujudkan keinginan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagaimana diketahui, selama dua tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, Pemprov Babel tercatat baru berhasil meraih opini WDP dari BPK. Sebab itu Gubernur Rustam Effendi menyampaikan permintaan maaf kepada segenap masyarakat Babel karena belum bisa meraih predikat WTP.

Anggota V BPK RI diwakili Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK, Bambang Pamungkas dalam sambutannya mengakui tidak mudah bagi pemerintah untuk memperoleh opini WTP atas LKPD yang dilaksanakan. Apalagi penerapan akuntansi berbasis akrual baru diberlakukan pada tahun ini yang menyebabkan pemerintah baik pusat maupun daerah lebih kom-



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

prehensif menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan maupun perubahan atas kekayaannya.

Dengan LKPD berbasis akrual, kata Bambang, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan daerah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai TA 2015 ke

dalam tujuh laporan dibandingkan dengan empat laporan yang selama ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Terkait pemberian opini WDP atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2015 sama dengan TA 2014, sebut Bambang, pengelolaan Asset Tetap (AT) masih menjadi salah satu permasalahan yang kembali muncul dalam pemeriksaan kali ini. Namun pada TA 2015 BPK menemukan tiga permasalahan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan LKPD. (cdr/ima/may)